

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Diskriminasi usia adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan, pelecehan terhadap individu atau sekelompok orang atas dasar usia yang menyebabkan berkurang atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh hak atau akses tertentu. Persyaratan usia maksimal bagi pencari kerja di perusahaan milik swasta termasuk tindakan diskriminasi usia jika tidak didasarkan pada alasan yang wajar ilmiah dan rasional. Pembuktian kewajaran dan keilmiahannya dapat dilihat dari produktivitas manusia, kondisi psikis dan fisik manusia, dan jenis pekerjaan. Produktivitas manusia ditentukan oleh kondisi fisik, bakat, minat, keahlian, pendidikan, kondisi kerja, kesejahteraan, keamanan, mesin dan teknologi, kesempatan untuk promosi jabatan, hubungan yang baik antar pekerja dan pimpinan, dan motivasi. Kinerja seseorang dipengaruhi kesehatan, kondisi fisik, mental, pola hidup, dan pola pikir. Jenis pekerjaan jasmani yang menggunakan tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik/terlatih secara umum tidak layak untuk membatasi calon pekerjanya.
2. Substansi Pasal 5 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) yang secara umum melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi. Penjelasan Pasal 5 yang hanya menyebutkan lima macam dasar diskriminasi yang dilarang tidak sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif atas dasar apapun. Perbuatan diskriminatif tidak hanya didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan keyakinan

politik, akan tetapi juga atas dasar lainnya yang bersifat membedakan, mengecualikan, mengucilkan, melecehkan individu atau kelompok yang berakibat pada pengurangan atau penghilangan kesempatan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Penjelasan Pasal 5 yang membatasi hanya lima macam jenis diskriminasi yang dilarang bertentangan dengan kaidah penulisan penjelasan karena pembatasan tersebut telah melahirkan norma baru atau peraturan baru.

3. Pembatasan usia maksimal yang dilakukan oleh perusahaan tidak mencerminkan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUDNRI 1945. Pembatasan yang termasuk sebagai tindakan diskriminatif tersebut tidak menghormati harkat dan martabat manusia serta tidak sesuai dengan cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan dilaksanakan dengan jalan kekeluargaan dan gotong royong, yaitu adanya sikap tolong menolong dan saling mencintai sehingga tidak akan terjadi bentuk-bentuk perlakuan yang merugikan orang lain. Persyaratan kerja yang tidak berkorelasi langsung dengan kompetensi atau keahlian merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berkeadilan. Usia maksimal 25, 27, dan 30 tahun sebagai dasar dalam penentuan penerimaan calon pekerja untuk semua jenis jabatan dalam suatu pekerjaan tidak rasional dan tidak adil. Secara teoritis semakin bertambah usia semakin matang kedewasaan seseorang yang akan berpengaruh positif terhadap perilaku dan sikap dalam bekerja.

## **6.2 Rekomendasi**

1. DPR bersama dengan Presiden yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang sebaiknya memperluas cakupan jenis diskriminasi yang dilarang bagi pencari kerja, tidak hanya terbatas pada 5 macam sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan, tetapi juga mencakup usia. Penjelasan Pasal 5 yang membatasi macam-macam diskriminasi sebaiknya dimasukkan dalam batang tubuh Pasal 5 serta menambahkan larangan diskriminasi usia.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No.39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dengan UUDNRI 1945.
3. Perusahaan dalam melakukan perekrutan sebaiknya lebih mendasarkan pada kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan dalam suatu jenis jabatan, persyaratan usia sebagai syarat kerja dapat digunakan jika dapat dipertanggungjawabkan. Jenis pekerjaan rohani yang membutuhkan kemampuan berfikir dan pengambil keputusan dapat menentukan batas usia minimal dengan berdasarkan pada kajian ilmiah lebih lanjut.
4. Masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya sekolah, LSM, perusahaan serta pemerintah perlu untuk mempromosikan tentang anti diskriminasi, khususnya diskriminasi usia. Sekolah melalui materi dalam mata pelajaran, ko kurikuler maupun ekstrakurikuler sebaiknya memasukkan muatan anti diskriminasi didalamnya, khususnya usia. LSM yang bergerak dalam

berbagai bidang, khususnya ketenagakerjaan sebaiknya mempromosikan anti diskriminasi yang salah satunya adalah diskriminasi usia.

5. Penelitian lebih lanjut tentang diskriminasi usia dalam bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan untuk lebih menguatkan argumentasi tentang diskriminasi usia untuk pengembangan Ilmu Hukum kedepannya. Penelitian tentang jenis pekerjaan yang sebaiknya tidak dibatasai dan dapat dibatasi dapat dilakukan dengan penelitian lintas disiplin, utamanya bidang ekonomi dan psikologi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Afandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2007. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Aschar, Saeful. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Buruh Perempuan dalam Hubungan Industrial*. Disertasi tidak dipublikasikan. PDIH UB:Malang.
- Ashshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Awaliyah, Siti. 2013. *Persepsi Mahasiswa dan Masyarakat tentang Pembatasan Usia dalam Perekutan Tenaga Kerja*. Perustakaan FIS UM (tidak dipublikasikan). Malang.
- Awaliyah, Siti. 2014. *Keefektivian Pasal Anti Diskriminasi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Jawa Timur*. Universitas Negeri Malang (tidak dipublikasikan tersimpan dalam perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial). Malang.
- Awaliyah, Siti. 2016. *The Effectiveness of Anti Discrimination Laws for Job Seeker in Indonesia*. Journal of Law, Policy of Globalization. ISSN 2224-3240. Vol.51. New York.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyele.nggaraan Pemerintahan Negara*. Pascasarjana UI. Jakarta.
- Badrulzaman, Miriam Darus. 2006. *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung:PT Alumni.
- Baut, Paul S dan Heny Harman K. 1988. *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.
- Bertens, K. 2011. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Biro Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2003. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- Brameld, T. 1975. *Education is Power*. New York, Rinerat and Winston Inc.

- Bruggink, J.J.H. **Refleksi Tentang Hukum**. Dialihbahasakan oleh Arief Sidharta. 1996. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Budiardjo, Miriam. 2014. **Dasar-dasar Ilmu Politik**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budiono, Abdul Rachmad. 2011. **Hukum Perburuhan**. PT. Indeks:Jakarta
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. 1999. **Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Departemen tenaga kerja. 2012. **Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia**. Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja. 2003. **Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial**. Jakarta.
- Desmita. 2013. **Psikologi Perkembangan**. PT Remadja Rosdakarya. Bandung.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2000. **Penyampaian Salinan Keputusan Pimpinan DPR RI No.35/PJMP/II/2000-2001 tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPR RI mengenai dua Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan**. Jakarta.
- Fatorochman. 2012. **Keadilan Perspektif Psikologi**. Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2014. **Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum**. Kencana Prenamedia Group. Jakarta.
- Fudyartanta, Ki. 2011. **Psikologi Perkembangan**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Garner, Bryan A (Ed). 2009.
- Garner, Bryan A (Ed). 2009. **Black's Law Dictionary**. Edisi ke 9. St. Paul USA:West Publishing Co.
- Gerungan, W.A. 2004. **Psikologi Sosial**. PT. Refika Aditama. Bandung
- Hadjon, Philipus M. 1987. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Harsono. 1997. **Prinsip-prinsip Latihan dan Latihan Kondisi Fisik**. Jakarta. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

- Hart, H.L.A. 2011. **Konsep Hukum**, dialihbahasakan dari Concept Law. Diterjemahkan Drs. Mohammad Nashihan, S.H, M.H, Drs. Ronny F. Sompie, S.H, M.H. Jakarta:Cintya Press.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. 1994. **Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20**. Alumni:Bandung.
- Huijbers, Theo. 2011. **Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah**. Yogyakarta: Kanisius.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2000. **Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata**. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2011. **Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif**. Dialihbahasakan dari Pure Partanto, Theory of Law. Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung:Nusa Media.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2012. **Kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja di Indonesia**. Jakarta.
- Keraf, A. Sonny. 1997. **Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi**. Yogyakarta:Kanisius.
- Kusuma, A.B. 2009. **Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan**. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Latif, Yudi Latif. 2011. **Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Levinson, Daniel J. 1977. **The mid-life transition: A period in adult psychosocial development**. Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes, Vol 40 (2), May 1977
- Mahkamah Konstitusi. 2010. **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002**. Buku I Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002**. Buku II Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002**. Buku X Perubahan UUD, Aturan

- Peralihan, dan Aturan Tambahan. Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2015. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Monks, F.J, AMP Knoers, dan Siti Rahayu Hadinoto. 2014. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Manullang, E. Fernando M. 2007. *Menggugat Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Moerdiono dkk. 1991. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. BP-7 Pusat. Jakarta
- Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfabeta. Bandung.
- Munandar, Ashar Sunyoto. 2014. *Psikologi Industri dan Organisasi*. UI Press. Jakarta
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. C.V Mandar Maju:Bandung.
- Newcomb, Theodore M, Ralph H Turner, Philip E Converse. 1985. *Psikologi Sosial* terjemahan dari Social Psychology the Human Interaction. Diterjemahkan oleh Joesoef Noesirwan, M. Soewondo, Fatimah Z Abdullah. CV. Diponegoro. Jakarta.
- Newton, Peter M. 1994. *Daniel levinson and his theory of adult development: A reminiscence and some clarifications*. Journal of Adult Development. Volume 1 Issue 3.
- Pius A dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola.
- Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi. 2013. *Karakteristik Ketenagakerjaan Umum Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012*. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Jakarta.
- Putra, Idhamsyah Eka dan Ardiningtiyas Pitaloka. 2012. *Psikologi Prasangka, Sebab, Dampak, dan Solusi*. Ghalia Indonesia. Bogor.

- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Rachmad, Teddy P. 2003. *Memadukan Langkah Membangun Indonesia*. Gerakan Jalan Lurus. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ranupandojo, Heidjrachman dan Suad Husnan. 2011. *Manajemen Personalis*. BPFE. Yogyakarta
- Raphael, DD. 2006. *Concepts of Justice*. Oxford University Press:New York.
- Rasjidi, Lili. 1985. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*. Remadja Karya. Bandung.
- Rawls, John. 1994. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press:Cambridge, Massachusetts.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan*, dialihbahasakan dari *A Theory of Justice*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Rebecca, Lawton dan Dianne Parker. 1998. *Individual Differences in Accident Liability: a Review and Integrative Approach*. The Journal of Human Factors and Ergonomics Society. Vol.40 No.4
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait lainnya*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Safa'at, Rachmad. 2013. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang:UB Press.
- Salim H.S. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Salim H.S. 2009. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sargeant, Malcom. 2011. *Age Discrimination and Diversity*. Cambridge University Press. New York.
- Sears, David O, Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau. 1985. *Psikologi Sosial* terjemahan buku Social Psychology. Diterjemahkan oleh Michael Andryanto dan Savitri Soekrisno. Erlangga. Jakarta.

- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung.
- Shafir, Eldar (Ed). 2016. *Dasar-Dasar Behavioral dalam Kebijakan Publik, Prasangka dan Diskriminasi, Interaksi Sosial, Serta Sistem Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kita Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sinha, Surya Prakash. 1993. *Jurisprudence Legal Philosophy in a Nutshell*. St. Paul Minn:West Publishing Co.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2009. *Produktivitas, Apa dan Bagaimana*. PT. Bumi Aksara:Jakarta.
- Smith, Rhona K.M dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi suatu pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Sub Direktorat Klasifikasi dan Pembakuan Statistik Derektorat Metodologi Statistik. 2002. *KBJI 2002, Klarifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.  
<https://sirusa.bps.go.id/webadmin/doc/KBJI2002.pdf>.
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Bandung.
- Sugiyanto. 1996. *Perkembangan dan Belajar Motorik*. Depdikbud, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Guru dan Tenaga Teknis bagian Penataran Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD Setara DII.
- Suharno. 1993. *Metodologi Pelatihan*. Bahan penataran pelatih tingkat dasar. Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat).
- Suseno, Franz Magnis. 1997. *13 Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*. Yogyakarta:Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta.

- Sutedi, Adrian. 2009. **Hukum Perburuhan**. Jakarta:Sinar Grafika.
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage. 2010. **Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**. Yogyakarta:Genta Publishing.
- Twining, William. 2009. **General Jurisprudence, Understanding Law from a Global Perspektve**. New York:Cambridge University Press.
- Widaryatmo dan Yeni Farida. 2014. **Analisis Mobilitas Tenaga Kerja, Hasil survey Angkatan Kerja Nasional 2014**. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Winarsunu, Tulus. 2008. **Psikologi Keselamatan Kerja**. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Bahan Pustaka Online/Internet**
- ACAS. What's the difference? Direct and indirect discrimination.  
<http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=4614>. Australian Human Rights Commission. Direct Discrimination.
- <https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12026>. Diakses tanggal 21 Pebruari 2016.
- Admin. 2010. **Jurnal Manajemen, Bahan Kuliah Manajemen**. Jurnal-sdm-blogspot.com. Diakses tanggal 18 Januari 2014.
- Age Diskrimination 2004. **Laws for which an exemption is provided by subsection 39 (1) Schedule 1**, Preliminary Part 1,Simplified outline Division 1. Section 1. [http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol\\_act/ada2004174/sch1.html](http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ada2004174/sch1.html)
- Antoni. 2013. **Produktivitas Tenaga Kerja dari Perspektif Sosial**. [www.bunghatta.ac.id](http://www.bunghatta.ac.id). Diakses tenggal 18 Januari 2014.
- Arti Kata. 2016. (online) <http://www.artikata.com/arti-359213-pembatasan.html>. Diakses tanggal 5 Juli 2016.
- Australian Human Rights Commission. 2015. **Positive Discrimination**. Online. <https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12078>. Diakses tanggal 21 Desember 2015.
- Australian Human Rights Commissions. **Complaints under the Age Discrimination Act**. Online.  
<https://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/making-complaint/complaints-under-age-discrimination-act>. Diakses tanggal 21 Oktober 2016.
- Budiono, Abdul Rachmad. 2007. **Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Anak**. Online <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s3-2009-kkbkk2dish-11047>. Diakses tanggal 11 Juni 2014.

- Cambridge Dictionaries Online.  
<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/positive-discrimination>. Diakses tanggal 20 Pebruari 2016
- Fauza, Akmal. 2016. *Komisi Yudisial Tiba-tiba Dukung Pensiuun Hakim Agung di Usia 70 Tahun*. Online. <http://www.qilawaqal.com/2016/03/komisi-yudisial-tiba-tiba-dukung.html>. Diakses tanggal 1 Desember 2016.
- Human Rights Resousource Center. 2000. *Circle of Rights Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training Resource*. University of Minnesota. <https://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module3.htm>. Diakses tanggal 6 Mei 2016.
- Indonesia Corruption Watch. 2008. *Perdebatan Batas Usia Hakim Agung Masih Alot; FKB Setuju 70 Tahun*. Online. <http://www.antikorupsi.org/id/content/perdebatan-batas-usia-hakim-agung-masih-alot-f-kb-setuju-70-tahun>. Diakses tanggal 1 Desember 2016.
- International Labour Organization. 2016. *Structure*. Online. <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/lang--en/index.htm>. Diakses tanggal 14 Pebruari 2016.
- International Labour Organization. 2016. *Origins and History*. Online. <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>. Diakses tanggal 14 Pebruari 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Online <http://kbbi.web.id/batas>. Diakses tanggal 5 Juli 2016
- Kawaguchi, Hasan. 2013. *Jenis Kelamin dan Gender*. Online. <http://kulpuhanmateri.blogspot.co.id/2013/07/jenis-kelamin-dan-gender.html>. Diakses pada tanggal 19 Nopember 2016.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Konsekuensi Logis Hakim sebagai Pejabat Negara*. 2016. Online. <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54668-konsekuensi-logis-hakim-sebagai-pejabat-negara.html>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2016.
- Laurie A. McCann. 2016. *Written Testimony of Laurie A. McCann, AARP Foundation Litigation*. Online. <https://www.eeoc.gov/eeoc/meetings/5-18-16/mccann.cfm>. Diakses tanggal 9 Oktober 2016
- McCann, Laurie. *Age Discrimination in Employment Legislation The United States Experience*. Online Adea-Paper. [http://www4.pmb.rowwwtpactiviDocumente%20europeneadea\\_paper.pdf](http://www4.pmb.rowwwtpactiviDocumente%20europeneadea_paper.pdf). diakses pada tanggal 1 Januari 2016

- New World Encyclopedia. 2014. ***Margaret Mead***. Online.  
[http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Margaret\\_Mead](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Margaret_Mead). Diakses pada tanggal 19 Nopember 2016.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*** versi online. 2014. <http://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 6 januari 2014.
- Setiawan, Agnas. ***Klasifikasi Ras Manusia***. Online.  
<http://geograph88.blogspot.co.id/2016/06/klasifikasi-ras-manusia.html>. Diakses pada tanggal 19 Nopember 2016.
- Shidarta. 2014. ***Affirmative Action sebagai Bentuk Diskriminasi Positif***. Binus University Faculty of Humanities. Online. <http://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/affirmative-action-sebagai-bentuk-diskriminasi-positif/>
- Sumber Ilmu. 2014. ***Keberagaman dan Diskriminasi Usia dalam Pekerjaan***. <http://sumber-kearifan.blogspot.com/2012/05/keberagaman-dan-diskriminasi-usia.html>. Diakses tanggal 18 Januari 2014.
- Suryaningsinh, Rokhmah N. 2013. ***Diskriminasi Berdasarkan Umur?***. kompasiana.com. diakses tanggal 12 September 2015
- RZK. 2014. ***Jimly:Usia Minimum Hakim 40 Tahun, KY ragu usulan ini bisa direalisasikan***. Online.  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540f9f4db0716/jimly--usia-minimum-hakim-40-tahun>. Diakses tanggal 1 Desember 2016.
- Taufik, Muhammad. ***Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan***. UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. online [file:///C:/Users/awaliyah1/Downloads/22-63-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/awaliyah1/Downloads/22-63-1-PB%20(1).pdf). Diakses tanggal 10 Juni 2014.
- The Greyzed Theme. 2006. ***Diskriminasi Usia pada Pasar Tenaga Kerja Indonesia***. buhadram.wordpress.com. Diakses tanggal 12 Januari 2014.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2001. Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 23 tahun 2001. Online.  
[https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/prijono\\_\\_20091015125259\\_2356\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/prijono__20091015125259_2356_0.pdf). Diakses tanggal 10 Juni 2017
- United State Department of Labor. 2014. ***Equal Employment Opportunity Age Discrimination***. <http://www.dol.gov/dol/topic/discrimination/agedisc.htm>. Diakses tanggal 10 Januari 2014.
- US Equal Employment Opportunuty Commission. 2014. ***Tentang EEOC***.  
<http://www.eeoc.gov/eeoc/index.cfm>.

Wexler, Maurice, Charles C Warner, Gary R Siniscalco, John L Quinn, Adam T Klein. *The Law of Employment Discrimination From 1985-2010*. ABA Journal of labor and Employment Law. American Bar Association. Volume 25 Tahun 2010. hal. 349. Diakses tanggal 4 Oktober 2012. Search.proquest.com/docview/751931335/141255A01A568BCEED2/.

Wikipedia. 2013. ***Human Development Index***,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Human\\_Development\\_Index](http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index). Diakses tanggal 4 Januari 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasya Pancakarsa)*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990)

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja*

Republik Indonesia Serikat. *Konstitusi Republik Indonesia Serikat* (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 3).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945* (Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) dan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006, dan Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950* (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 56 dan Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Nomor 37).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Republik Indonesia. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Republik Indonesia. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).

Republik Indonesia. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	ii
<b>RINGKASAN .....</b>	iii
<b>SUMMARY .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	

1.1 Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6 Desain Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7 Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7.1 Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7.3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7.5 Analisis Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.8 Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL**

2.1 Kerangka Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Teori Negara Hukum Kesejahteraan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3 Teori Keadilan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.4 Teori Hak Asasi Manusia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- 2.1.5 Teori Produktivitas Manusia .....Error! Bookmark not defined.
- 2.1.6 Teori Perkembangan.....Error! Bookmark not defined.
- 2.2 Kerangka Konseptual .....Error! Bookmark not defined.
  - 2.2.1 Konsep Diskriminasi Usia .....Error! Bookmark not defined.
  - 2.2.2 Konsep Ketenagakerjaan.....Error! Bookmark not defined.
  - 2.2.3 Asas Anti Diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.....Error! Bookmark not defined.

### **BAB III KAJIAN KRITIS DISKRIMINASI USIA DALAM PERSYARATAN PEMBATASAN USIA MAKSIMAL BAGI PENCARI KERJA**

- 3.1 Kajian Jenis Pekerjaan dan Jabatan dalam suatu Pekerjaan .....Error! Bookmark not defined.
- 3.2 Makna Diskriminasi Menurut Kamus, Pendapat Para Ahli, Peraturan Perundang-Undangan, dan Konvensi Internasional... Error! Bookmark not defined.
  - 3.2.1 Hakekat Diskriminasi Usia .....Error! Bookmark not defined.
  - 3.2.2 Diskriminasi dalam Pancasila, Konvensi Internasional, dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ...Error! Bookmark not defined.
- 3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penempatan Tenaga Kerja.....Error! Bookmark not defined.
- 3.4 Perjanjian Kerja dalam Suatu Hubungan Kerja.Error! Bookmark not defined.
  - 3.4.1 Dasar Perjanjian Kerja .....Error! Bookmark not defined.
  - 3.4.2 Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....Error! Bookmark not defined.
- 3.5 Kewenangan Perusahaan dalam Membatasi Usia bagi Calon Pekerjanya dalam Suatu Hubungan Kerja .....Error! Bookmark not defined.
  - 3.5.1 Makna Pembatasan Usia bagi Pencari Kerja ....Error! Bookmark not defined.
  - 3.5.2 Batas Kewenangan Perusahaan Menetapkan Persyaratan dalam Perekutan Tenaga Kerja ....Error! Bookmark not defined.
  - 3.5.3 Rekrutmen Karyawan Perusahaan dan Penilaian Prestasi Kerja.....Error! Bookmark not defined.

- 3.6 Kecakapan Seseorang untuk Melakukan Pekerjaan Ditinjau dari Teori Produktivitas Manusia, dan Teori Perkembangan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.6.1 Produktivitas Manusia Ditinjau dari Aspek Sumber Daya Manusia.....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.6.2 Kondisi Fisik Tubuh Manusia Ditinjau dari Ilmu Keolahragaan.....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.6.3 Perkembangan Kognitif, Psikososial, dan Fisik Manusia ...**Error! Bookmark not defined.**
- 3.7 Kajian Kritis Persyaratan Usia Maksimal sebagai Tindakan Diskriminasi Usia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Teoritis ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV SINKRONISASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PASAL 28I UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

- 4.1 Kajian Kritis Anti Diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ....**Error! Bookmark not defined.**
- 4.1.1 Anti Diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Error! Bookmark not defined.**
- 4.1.2 Perlindungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pencari Kerja **Error! Bookmark not defined.**
- 4.1.3 Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....**Error! Bookmark not defined.**
- 4.1.4 Koherensi antara Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....**Error! Bookmark not defined.**
- 4.2 Kajian Kritis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Anti Diskriminasi di Amerika dan Australia .....**Error! Bookmark not defined.**
- 4.2.1 Peraturan Anti Diskriminasi Usia di Amerika (Age Discrimination of Employment Act 1967)..**Error! Bookmark not defined.**

4.2.2 Undang-Undang Anti Diskriminasi Usia di Australia Tahun 2004 (Age Discrimination Act 2004) .....Error! Bookmark not defined.

4.2.3 Analisis Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Anti Diskriminasi Usia di Amerika, Australia, dan Indonesia ....Error! Bookmark not defined.

## **BAB V WUJUD KEADILAN DALAM PERSYARATAN USIA MAKSIMAL BAGI PENCARI KERJA DITINJAU DARI PANCASILA, TEORI PERKEMBANGAN, TEORI PRODUKTIVITAS, DAN TEORI KEADILAN**

5.1 Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara dalam Mewujudkan Keadilan untuk Mencapai Negara Kesejahteraan.....Error! Bookmark not defined.

5.2 Keadilan dalam Persyaratan Usia bagi Pencari Kerja Ditinjau dari Perspektif Teori Produktivitas Manusia dan Teori Perkembangan..Error! Bookmark not defined.

5.3 Kajian Kritis Persyaratan Usia Maksimal bagi Pencari Kerja Ditinjau dari Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Teori Keadilan Menurut John Rawls .....Error! Bookmark not defined.

## **BAB VI P E N U T U P**

6.1 Kesimpulan.....1

6.2 Rekomendasi .....3

**DAFTAR RUJUKAN.....5**

Pentingnya HAM: pendekatan argumentatif filosifis, historis, aktual,  
geostrategis, futuristik hlm 125

Usia: 160

449





